

**“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah”
(Studi Empiris pada Kota Solok, Kabupaten Solok dan
Kabupaten Solok Selatan)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

VELIA YOLANDA

2017/17043087

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Kota Solok, Kabupaten Solok dan
Kabupaten Solok Selatan)

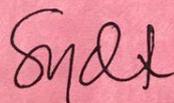
Nama : Velia Yolanda
NIM/TM : 17043087/2017
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2021

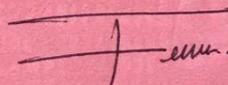
Disetujui Oleh:

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing



Sany Dwita SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D
NIP. 19800103 200212 2 001



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kota
Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Seiatan)

Nama : Velia Yolanda

NIM/TM : 17043087/2017

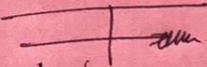
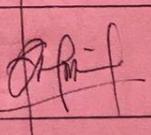
Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2021

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	1. 
2	Anggota	Halmawati S.E, M. Si	2. 
3	Anggota	Herlina Helmy, S.E, Ak., M.S.Ak., CA	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Velia Yolanda
TM/NIM	: 2017/17043087
Tempat/Tanggal lahir	: Solok/22 Juli 1999
Jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Jl. Zuhlul St Kebesaran No.15
No. HP/Telp	: 0813-7158-0404
Judul Skripsi	: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh melalui karya tulis.skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2021
Saya yang menyatakan



Velia Yolanda
NIM. 17043070

ABSTRAK

Velia Yolanda (17043087/2017): Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan)

Pembimbing : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD dan DPRD yang ada di Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan dengan sampel yang diambil sebanyak 121. Teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling*. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen dan kualitas laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, latar belakang pendidikan, pengetahuan akuntansi sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Latar belakang Pendidikan, Pengetahuan Akuntansi, Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah daerah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan teladan terbaik bagi manusia menuju kebaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Selain itu juga untuk memperluas ilmu pengetahuan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang berguna bagi masyarakat. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak dapat mendapat bantuan dan dorongan serta kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku dosen pembimbing atas semua bimbingan, motivasi seta kesediaan waktu memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Halmawati SE, M.Si selaku dosen penelaah untuk arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi karya yang lebih baik.

3. Ibu Herlina Helmy, SE, Ak., M.S.Ak., CA selaku dosen penguji untuk penilaian dan saran perbaikan terhadap skripsi ini.
4. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ph. D, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang untuk semua kebijakan yang sudah ditetapkan.
5. Ibu Nurzi Sebrina, SE, Ak, M.Sc, selaku dosen pembimbing akademik yang sudah memberikan masukan dan arahan selama penulis melaksanakan studi.
6. Abang Rizky selaku admin prodi akuntansi yang sudah mempermudah segala urusan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa untuk Mama dan Papa yang sangat penulis sayangi, atas doa-doa luar biasa yang tidak hentinya serta kasih sayang yang tidak ternilai sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk selalu percaya pada setiap langkah yang penulis pilih dan memberikan keyakinan bahwa penulis mampu memberikan yang terbaik. Semoga lelah Mama dan Papa dapat berbuah manis suatu hari nanti.
8. Kak gita, Bang yogi dan Bang Dendy, terimakasih sudah menjadi kakak dan abang yang luar biasa, sehingga penulis ada di titik ini.
9. Aldo, terimakasih selalu memberi dukungan kepada penulis dan selalu bersedia menemani penulis.
10. Kak Nadia dan Didi selaku sepupu yang selalu ada disetiap penulis butuh.

11. Kepada teman-teman di Grup TDRP, Faizha, Della, Tika dan Intan terimakasih untuk memberi warna untuk hari-hari yang tidak selalu menyenangkan.
12. Teman-teman akuntansi kelas C, penulis beruntung sekali bisa berada diantara orang-orang luar biasa seperti kalian.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan Saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis.

Padang, Agustus 2021

Velia Yolanda
NIM. 17043087

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	14
A. Teori Agensi.....	14
B. Kualitas Laporan Keuangan.....	16
C. Aksesibilitas Laporan Keuangan.....	19
D. Latar Belakang Pendidikan.....	21
E. Pengetahuan Akuntansi.....	23
F. Pemanfaatan Laporan Keuangan.....	25
G. Penelitian Terdahulu.....	31
H. Hubungan Antar Variabel.....	34
I. Kerangka Konseptual.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Populasi , Sampel dan Responden.....	43
1. Populasi.....	43
2. Sampel.....	44
3. Responden.....	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
1. Jenis Data.....	45
2. Sumber Data.....	45
D. Tekhnik Pengumpulan Data.....	45
E. Variabel Penelitian.....	46
1. Variabel Dependen.....	46
2. Variabel Independen.....	46
F. Pengukuran Variabel.....	47
G. Intrumen Penelitian.....	47
H. Analisis Deskriptif.....	49
I. Uji Kualitas Data.....	49
1. Uji Validitas.....	49
2. Uji Reliabilitas.....	50
J. Uji Asumsi Klasik.....	51
1. Uji Normalitas.....	51
2. Uji Multikolinieritas.....	51

3. Uji Heterokedastisitas.....	52
K. Analisis Regresi Linear Berganda.....	52
L. Pengujian Hipotesis.....	53
1. Koefisien Determinasi (Adjusted R Square).....	53
2. Uji F (F-Test).....	54
3. Uji Hipotesis (Uji t).....	54
M. Defenisi Operasional.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	57
B. Karakteristik Responden.....	58
C. Statistik Deskriptif.....	63
D. Deskripsi Variabel Penelitian.....	64
E. Uji Kualitas Data.....	73
1. Uji Validitas.....	73
2. Uji Reliabilitas.....	77
F. Uji Asumsi Klasik.....	78
1. Uji Normalitas.....	78
2. Uji Multikolinieritas.....	80
3. Uji Heterokedastisitas.....	81
G. Analisis Regresi Linear Berganda.....	82
H. Uji Kelayakan Model.....	85
1. Koefisien Determinasi (Adjusted R Square).....	85
2. Uji F (F-test).....	86
3. Uji Hipotesis (Uji T).....	87
I. Pembahasan Hipotesis.....	90
1. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	90
2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	92
3. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemeritah Daerah.....	95
4. Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Keterbatasan.....	101
C. Saran.....	101
D. Implikasi.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah SKPD dan DPRD.....	43
Tabel 3.2 Jumlah Responden.....	44
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	48
Tabel 4.1 Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner.....	57
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	58
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Unit Bekerja.....	60
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	61
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Pendidikan Terakhir....	62
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Keikutsertaan Pelatihan Akuntansi.....	62
Tabel 4.8 Deskriptif Tanggapan Responden.....	63
Tabel 4.9 Tabel Distribusi Frekuensi Kualitas Laporan Keuangan.....	65
Tabel 4.10 Tabel Distribusi Frekuensi Aksesibilitas Laporan Keuangan.....	67
Tabel 4.11 Tabel Distribusi Frekuensi Pengetahuan Akuntansi.....	68
Tabel 4.12 Tabel Distribusi Frekuensi Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	71
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan.....	73
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Aksesibilitas Laporan Keuangan.....	74
Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Akuntansi.....	75
Tabel 4.16 Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Laporan Keuangan.....	76
Tabel 4.17 Hasil Uji Reliabilitas Masing-masing Variabel.....	78
Tabel 4.18 Hasil Uji Normalitas.....	79
Tabel 4.19 Hasil Uji Multikolinieritas.....	80
Tabel 4.20 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	81
Tabel 4.21 Hasil Analisis Linear Berganda.....	82
Tabel 4.22 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	85
Tabel 4.23 Hasil Uji F.....	86
Tabel 4.24 Hasil Uji t.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual..... 42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah melaksanakan pertanggungjawaban atas pengelolaan APBN/APBD dalam bentuk laporan keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003. Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur yang terkait posisi keuangan dan semua transaksi yang terjadi pada periode tertentu oleh entitas pelaporan. Hasil yang telah dicapai dan upaya yang dilakukan oleh suatu entitas dalam suatu periode tertentu harus dilaporkan secara sistematis dan terstruktur. Pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan dengan penerapan SAP dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pengguna (user) dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan (Sudarno, 2014).

Standar Akuntansi Pemerintahan diatur secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Basis akuntansi yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 adalah basis akrual. Basis akrual secara teoritis diyakini memberikan gambaran yang lebih lengkap serta sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah tidak hanya sekedar memenuhi pertanggungjawaban kepada publik, akan tetapi laporan keuangan tersebut harus memenuhi kebutuhan para

penggunanya agar laporan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penggunanya.

Pemanfaatan laporan keuangan pemerintah merupakan penggunaan informasi yang ada pada laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan pemerintah oleh pengguna laporan keuangan (Prijahanto & Andriana, 2020). Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah akan digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna internal dan eksternal entitas pelaporan. Pengguna internal dari laporan keuangan pemerintah adalah pemerintah itu sendiri sebagai pihak yang telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sedangkan pengguna eksternal meliputi DPRD, Badan Pengawas Keuangan, investor, kreditor donatur, analisis ekonomi dan pemerhati pemda, rakyat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain (Halim, 2007:37). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 laporan keuangan pemerintah akan digunakan oleh beberapa kelompok pengguna diantaranya: a) Masyarakat; b) Wakil rakyat, lembaga pemeriksa dan lembaga pengawas; c) Pihak pemberi atau berperan dalam proses donasi; d) Pemerintah.

Riset terkait pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah oleh penggunanya menjadi menarik untuk diteliti (Francissca, 2014 dan Fetriwahyuni, 2015). Hal ini dikarenakan seringkali laporan keuangan pemerintah disajikan hanya untuk memenuhi pertanggung jawaban saja (Prijahanto & Andriana, 2020). Padahal laporan keuangan pemerintah daerah harus digunakan sebagai media perencanaan, manajerial, pengawasan dan pengambilan keputusan. Pada penelitian Affandi (2017) ditemukan bahwa

pihak eksekutif sebagai pengguna internal laporan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya belum memanfaatkan dengan optimal ketujuh laporan keuangan yang sudah disajikan. Dalam penelitian Kurniawati (2017) juga ditemukan bahwa DPRD sebagai pihak eksternal entitas pelaporan dalam menjalankan fungsinya juga belum memanfaatkan laporan keuangan yang disajikan dengan maksimal. Penyebab dari fenomena tersebut terjadi dikarenakan oleh beberapa kendala dalam memanfaatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Fontanella (2010) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah belum dimanfaatkan dengan optimal oleh kepala SKPD. Prijahanto & Andriana (2020) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah yang berbasis akrual yang diyakini memberikan informasi yang lebih lengkap dan sesuai kondisi keuangan ternyata belum banyak digunakan oleh manajemen. Pemanfaatan laporan keuangan yang belum optimal oleh penggunanya menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi aspek kebermanfaatan (Francissca, 2014).

Dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya untuk keperluan perencanaan, pengendalian, menilai akuntabilitas, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja. Menurut Suwardjono (2005:165) suatu informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut berguna dalam mengambil keputusan atau informasi tersebut harus mempunyai nilai. Suatu informasi akan bermanfaat jika pengguna mempercayai dan memahami informasi tersebut sehingga nantinya informasi tersebut dapat

digunakan oleh pemakai (user). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat digunakan terutama untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional di pemerintahan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, mengetahui kondisi keuangan dan juga dapat mengetahui sejauhmana ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori agensi dapat dimaknai sebagai hubungan dalam suatu kontrak antara seseorang atau lebih sebagai prinsipal (pihak pemberi amanah) dengan memerintahkan orang lain sebagai agen (pihak yang diberikan amanah). Meskipun hubungan antara agen dan prinsipal merupakan hubungan kerjasama, akan tetapi masing-masing pihak memiliki perbedaan kepentingan yang menyebabkan timbulnya konflik kepentingan. Untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut maka laporan keuangan yang disusun oleh agen sebagai bentuk pertanggungjawaban harus dapat dimanfaatkan. Melalui informasi yang terdapat didalam laporan keuangan yang telah disusun oleh agen, prinsipal dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk menilai akuntabilitas, pengendalian dan penilaian kinerja agen atas amanah yang diberikan. Selain itu informasi yang ada dalam laporan keuangan juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan seperti dalam perencanaan, penganggaran dan pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan laporan keuangan yang telah disusun oleh agen maka akan menghindarkan terjadinya penyelewengan, pelaksanaan yang tidak terarah, tidak matangnya perencanaan, pengawasan

yang tidak efektif dan pengambilan keputusan yang tidak tepat. Namun dalam beberapa riset yang sudah ada menunjukkan bahwa pengguna (user) laporan keuangan sebagai prinsipal ternyata belum memanfaatkan laporan keuangan dengan optimal.

Dalam teori keagenan juga terdapat asumsi bahwa telah terjadinya asimetri informasi antara prinsipal dan agen (Narhatyo & Utami, 2019). Adapun salah satu informasi yang dimiliki oleh agen berupa laporan keuangan. Adanya asimetri informasi tersebut dapat menyebabkan pengguna laporan keuangan (prinsipal) belum memanfaatkan laporan keuangan dengan optimal. Oleh karena itu pihak manajemen selaku agen harus menyajikan laporan yang berkualitas dan menyediakan aksesibilitas atau kemudahan untuk mengakses informasi yang ada dalam laporan keuangan pemerintah sehingga asimetri informasi dapat dijumpatani dan laporan keuangan dapat dimanfaatkan oleh prinsipal untuk berbagai kepentingan. Dalam memanfaatkan laporan keuangan pengguna laporan keuangan (prinsipal) harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup agar dapat memanfaatkan laporan keuangan dengan optimal.

Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna dalam memanfaatkan laporan keuangan pemerintah daerah (Francissca, 2014). Dari beberapa penelitian sebelumnya diidentifikasi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna dalam memanfaatkan laporan keuangan pemerintah daerah seperti latar belakang pendidikan, pengetahuan akuntansi, kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan. Dalam pemanfaatan

laporan keuangan pemerintah para pengguna harus memiliki pengetahuan atau pemahaman terkait laporan keuangan pemerintah tersebut. Pengetahuan Akuntansi sangat penting dimiliki oleh pengguna laporan dalam memanfaatkan laporan keuangan sehingga dapat memanfaatkannya dengan optimal. Seseorang dikatakan mempunyai pengetahuan akuntansi apabila dia mengerti bagaimana proses akuntansi itu sendiri (Francissca, 2014). Pengguna yang memiliki pengetahuan akuntansi akan memiliki pemahaman terkait informasi-informasi yang ada pada laporan keuangan sehingga akan membantu mereka dalam menggunakan dan memanfaatkan informasi yang ada pada laporan keuangan pemerintah dengan baik. Apabila penggun tidak paham tentang laporan keuangan pemerintah daerah, maka pengguna cenderung tidak akan menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah dengan maksimal (Mulia, 2016).

Faktor selanjutnya yaitu latar belakang pendidikan. Latar Belakang pendidikan merupakan pendidikan terakhir pegawai di suatu organisasi pemerintah (Fetriwahyuni, 2015). Kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan bentuk pekerjaan yang akan dilakukan dapat berpengaruh. Hal ini berkaitan dengan kualifikasi individu dengan pekerjaannya. Kualifikasi individu yang berkaitan dengan pemanfaatan laporan keuangan pemerintah adalah ekonomi. Pengguna laporan keuangan pemerintah yang berasal dari ekonomi akan berbeda dengan pengguna laporan keuangan pemerintah yang tidak berasal dari ekonomi dalam hal pemanfaatan laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi akan memiliki

pengetahuan dan kompetensi yang mungkin akan lebih baik dalam penggunaan laporan keuangan apabila dibandingkan dengan yang berlatar belakang pendidikan non akuntansi (Sudarno, 2014).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengguna dalam pemanfaatan laporan keuangan yaitu kualitas laporan keuangan. Menurut Haza (2015) laporan keuangan yang berkualitas adalah apabila informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dipahami, bebas dari pengertian menyesatkan, sesuai dengan kebutuhan para pemakainya terutama dalam hal pengambilan keputusan, bebas dari kesalahan yang material dan dapat diandalkan sehingga nantinya laporan tersebut dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Keuangan Pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik sebagaimana yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Steccoloni (2002) dalam penelitiannya menyatakan bahwa para pengguna laporan keuangan pemerintah di Italia tidak dapat memanfaatkan laporan keuangan pemerintah karena rendahnya kualitas informasi yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa apabila laporan keuangan tidak berkualitas maka pengguna tidak dapat memanfaatkan laporan keuangan tersebut.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi pengguna dalam pemanfaatan laporan keuangan adalah aksesibilitas. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi yang ada pada laporan keuangan pemerintah (Ichalina,

2019). Adanya akses secara langsung bagi para pengguna laporan keuangan akan membantu pengguna untuk dapat menggunakan informasi yang ada pada laporan keuangan pemerintah. Tidak adanya kemudahan para pengguna laporan keuangan untuk memperoleh informasi yang ada akan menyebabkan pengguna kurang tertarik untuk menggunakan dan memanfaatkan informasi yang ada pada laporan keuangan pemerintah dengan optimal (Jones et. Al, 1985 dalam bandary 2011).

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian Fontanella (2010) yang berjudul pengaruh latar belakang pendidikan dan pengetahuan akuntansi terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. Pembaharuan dari penelitian ini adalah dengan menambahkan dua variabel independen yaitu kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan. Hasil dari penelitian Fontanella (2010) menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan laporan keuangan. Sedangkan latar belakang pendidikan tidak signifikan secara statistik terhadap pemanfaatan laporan keuangan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Fetriwahyuni (2015) yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan pengguna berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah.

Priharjanto & Andriana (2020) telah melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap pemanfaatan laporan keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap pemanfaatan

laporan keuangan. Sedangkan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan, akan tetapi secara simultan aksesibilitas dan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah.

Alasan dilakukan penelitian ini yaitu masih belum optimalnya pemanfaatan laporan keuangan pemerintah oleh penggunanya. Padahal optimalisasi pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah oleh penggunanya menjadi sangat penting (Fontanella, 2010). Hal ini dikarenakan proses penyusunan laporan keuangan pemerintah telah menghabiskan biaya, infrastruktur dan sumber daya manusia yang tidak sedikit. Apabila informasi yang dihasilkan oleh pemerintah ini tidak dioptimalkan pemanfaatannya maka dapat dikatakan bahwa negara akan rugi dalam jumlah yang besar. Akibat dari tidak optimalnya pemanfaatan informasi yang ada dalam laporan keuangan pemerintah akan menyebabkan tidak matangnya perencanaan, terjadinya penyelewengan, pelaksanaan yang tidak terarah, pengawasan yang tidak efektif serta dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat.

Adanya GAP dari beberapa penelitian terdahulu yang cenderung melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah dari perspektif pengguna internal, padahal pengguna dari laporan keuangan pemerintah terdiri dari pihak internal dan eksternal. Berbeda dari penelitian yang sudah dilakukan Fontanella (2010), Francissca (2014) Fetriwahyuni (2015) dan Priharjanto & Andriana (2020) yang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan laporan

keuangan pemerintah daerah dari perspektif pengguna internal, penelitian ini mencoba menggali faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan laporan keuangan dari perspektif pengguna internal dan perspektif pengguna eksternal.

Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah yang memanfaatkan laporan keuangan pemerintah daerah secara langsung diantaranya eksekutif, legislatif dan yudikatif (Pratiwi, 2014). Pihak eksekutif sebagai pihak yang mengelola keuangan dan pembuat laporan keuangan harus memanfaatkan laporan keuangan untuk keputusan perencanaan, penganggaran dan pengendalian. Pihak legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan juga harus memanfaatkan laporan keuangan pemerintah untuk menilai kinerja dan memberikan rekomendasi. Selain itu laporan keuangan pemerintah dapat dimanfaatkan oleh legislatif untuk melakukan perencanaan dan penganggaran (Kurniawati, 2017). Pihak yudikatif sebagai pemeriksa juga harus memanfaatkan laporan keuangan untuk menentukan hasil pemeriksaan atas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini akan dilakukan di seluruh SKPD dan DPRD di Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Solok. Pada tahun 2017 sampai 2019 Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Dengan diperolehnya opini WTP menandakan bahwa laporan keuangan pemerintah Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan sudah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material,

posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan dapat dimanfaatkan oleh penggunanya dalam berbagai kepentingan. Berdasarkan prestasi yang diperoleh pemerintah Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan selama 3 tahun berturut-turut. Sangat disayangkan jika pengguna laporan keuangan pemerintah tidak memanfaatkan laporan keuangan pemerintah tersebut dengan optimal. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna dalam pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan dengan optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sejauhmana kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Sejauhmana aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Sejauhmana latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah?

4. Sejauhmana pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap pemanfaatan informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh aksebilitas terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Dapat menambah pengetahuan dan lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan laporan keuangan pemerintah oleh pengguna internal dan eksternal.
 - b. Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarja Ekonomi di Universitas Negeri Padang.

2. Bagi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya kualitas laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, latar belakang pendidikan dan pengetahuan akuntansi terhadap pemanfaatan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan.

3. Bagi Akademisi

Dapat menambah pengetahuan dibidang sektor publik dan dapat dijadikan referensi bagi calon penelitian selanjutnya yang tertarik untuk melakukan pengembangan dari penelitian ini atau berminat melakukan penelitian terkait masalah yang dibahas pada penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Teori Agensi

Teori agensi dapat dimaknai sebagai hubungan dalam suatu kontrak antara seseorang atau lebih (prinsipal) sebagai pemberi amanah dengan memerintahkan orang lain (agen) sebagai pihak yang diberikan amanah untuk melakukan layanan atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen dalam membuat keputusan yang terbaik menurut agen untuk prinsipal (Jansen dan Meckling dalam buku Narhatyo & Utami, 2019: 73-75). Teori agensi muncul karena adanya hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak oleh prinsipal untuk melakukan tugas tertentu yang telah dipercayakan kepada mereka dan agen memiliki tanggungjawab atas segala tugas yang sudah diberikan oleh prinsipal. Prinsipal sebagai pemberi tugas kepada agen berkewajiban memberikan agen imbalan atas apa yang telah mereka kerjakan (Bandariy, 2011).

Dalam hubungan keagenan, seringkali terjadi konflik keagenan antara agen dan prinsipal walaupun keduanya memiliki hubungan kerjasama. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal kedua pihak baik agen maupun prinsipal bersikap rasional dan terdapat preferensi resiko dimana agen cenderung berusaha untuk menghindari resiko sedangkan prinsipal bersifat netral terhadap resiko. Selain itu dalam teori keagenan terdapat asumsi bahwa telah terjadinya asimetri informasi antara prinsipal dan agen dikarenakan informasi yang

diperoleh prinsipal tidak cukup untuk memonitor perilaku agen dan mengevaluasi kinerja agen (Narhatyo & Utami, 2019). Dalam hal ini prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, akan tetapi ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh prinsipal tidak seluruhnya disajikan oleh agen (Mulia, 2016).

Hubungan antara pemerintah dengan pengguna laporan keuangan dapat disebut dengan hubungan keagenan (Friyani, et. al, 2020). Pemerintah sebagai agen akan menghindari terjadinya ketidakpercayaan publik terhadap kinerja mereka. Sehingga pemerintah akan berusaha menunjukkan dengan kinerja yang baik dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan daerah yang telah dipercayakan kepadanya (Bandariy, 2011). Pemerintah sebagai pihak pemegang amanah (agen) memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan oleh masyarakat atau pengguna laporan keuangan sebagai pemberi amanah (prinsipal) dengan menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala bentuk kegiatan dan aktivitas yang telah dilaksanakan dalam menjalankan tanggung jawabnya berupa laporan keuangan. Tanggung jawab yang ditunjukkan oleh pemerintah tidak hanya sekedar penyajian laporan keuangan saja, akan tetapi laporan keuangan yang disajikan tersebut harus berkualitas. Selain itu pemerintah juga harus memberikan akses yang mudah untuk para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi terkait laporan keuangan. Dengan disajikannya laporan keuangan yang berkualitas dan tersedianya

akses yang mudah untuk memperoleh informasi terkait laporan keuangan maka laporan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penggunanya dengan optimal. Jika laporan keuangan hanya sekedar disajikan saja tetapi tidak adanya kemudahan pengguna untuk mengakses informasi tersebut, maka pengguna tidak akan bisa memanfaatkan laporan keuangan pemerintah dengan baik (Mulia, 2016).

Pemerintah sebagai pemegang amanah harus menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan (sebagai pemberi amanah) sehingga nantinya dapat digunakan langsung oleh penggunanya ataupun melalui wakil-wakilnya untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik (Friyani, et. al, 2020). Pengguna laporan keuangan dalam memanfaatkan laporan keuangan yang telah disajikan oleh pemerintah harus memiliki pengetahuan terkait informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Jika pengguna laporan keuangan tersebut tidak memiliki pengetahuan akuntansi maka akan sulit untuk memahami informasi yang ada pada laporan keuangan pemerintah.

B. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Haza (2015) laporan keuangan yang berkualitas adalah apabila informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dipahami, bebas dari pengertian menyesatkan, sesuai dengan kebutuhan para pemakainya terutama dalam hal pengambilan keputusan, bebas dari kesalahan yang material dan dapat diandalkan sehingga nantinya laporan

tersebut dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan maka akan terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan agar dapat dikatakan berkualitas diantaranya:

1. Relevan

Laporan Keuangan yang dihasilkan pemerintah dapat dikatakan relevan apabila informasi yang ada pada laporan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi kejadian masa lalu atau masa kini dan dapat memprediksi masa yang akan datang serta dapat mengoreksi hasil evaluasi dimasa lalu. Oleh karena itu, informasi yang relevan dapat dikaitkan dengan maksud dari pengguna laporan keuangan. Informasi yang relevan harus memiliki umpan balik (memungkinkan pengguna informasi untuk mengoreksi ekspektasinya dimasa lalu), memiliki manfaat prediktif (dapat digunakan oleh pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang), disajikan tepat waktu dan harus disajikan selengkap mungkin.

2. Andal

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah harus bebas dari informasi yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan semua fakta dengan jujur dan dapat diverifikasi. Jika informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sudah dikatakan relevan tetapi

penyajianya tidak dapat diandalkan, maka informasi tersebut dapat menyesatkan jika digunakan. Informasi pada laporan keuangan dapat dikatakan andal jika informasi tersebut disajikan dengan jujur (semua transaksi dan peristiwa lainnya harus disajikan), informasi harus dapat diverifikasi (informasi yang ada harus dapat diuji kebenarannya) dan informasi harus bersifat netral (tidak berpihak kepada pihak tertentu saja tetapi harus untuk kepentingan umum).

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah dapat lebih berguna jika informasi tersebut dapat dibandingkan dengan informasi yang ada pada laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan lainnya. Perbandingan laporan keuangan tersebut dapat dilakukan secara eksternal atau internal. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan jika entitas pelaporan yang akan dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Sedangkan perbandingan laporan keuangan secara internal dapat dilakukan apabila suatu entitas pelaporan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun sebelumnya.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang ada pada laporan keuangan pemerintah harus dapat dipahami oleh penggunanya dan dinyatakan dengan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu pengguna dianggap memiliki pengetahuan terkait kegiatan dan

lingkungan operasi entitas pelaporan dan diharapkan adanya kemauan untuk mempelajari informasi yang ada agar para pengguna dapat memahami maksud dari informasi tersebut.

Laporan keuangan yang berkualitas sangat berperan penting dalam pemanfaatan laporan keuangan bagi penggunanya baik pengguna internal maupun pengguna eksternal. Jika laporan keuangan tidak menyajikan informasi yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan maka pengguna laporan keuangan tidak akan menggunakan laporan keuangan tersebut. Tidak berkualitasnya laporan yang disajikan oleh pemerintah daerah akan menimbulkan keraguan bagi pengguna laporan keuangan untuk memanfaatkan informasi yang ada. Oleh karena itu pengguna laporan keuangan akan memanfaatkan atau menggunakan laporan keuangan jika informasi yang ada pada laporan keuangan tersebut memiliki kualitas yang baik. Pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dapat melakukannya dengan peningkatan kualitas informasi yang disajikan dan pengungkapan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan (Priharjanto & Andriana, 2020).

C. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Menurut perspektif tata ruang aksesibilitas adalah keadaan dimana tersedianya hubungan dari suatu tempat ke tempat yang lain atau kemudahan bagi seseorang atau penghubung untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan cepat, nyaman dan aman serta adanya kecepatan yang wajar (Koester 2002 dalam Peggy 2013). Menurut Ichalina (2019)

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi pengguna dalam memperoleh informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah oleh masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan wajib memberikan hak kepada publik untuk mendapatkan informasi atas pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan keuangan agar dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah (Mardiasmo, 2002). Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban mengisyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

Pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas tidak hanya terkendala dengan informasi laporan keuangan yang relevan sesuai dengan kebutuhan para pengguna, akan tetapi juga karena tidak terdapatnya akses secara langsung bagi para pengguna potensial (Bandary 2011). Tidak adanya akses secara langsung bagi pengguna laporan keuangan menyebabkan para pengguna laporan keuangan kurang tertarik untuk memanfaatkan dan menggunakan informasi laporan keuangan dengan optimal (Jones et, al, 1985 dalam Bandariy 2011).

Terdapat beberapa indikator dalam aksesibilitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan diantaranya keterbukaan, kemudahan dan *accessible* (Sande, 2013). Keterbukaan yaitu laporan keuangan daerah yang telah disusun dipublikasikan secara terbuka melalui media masa. Kemudahan yaitu pemerintah harus memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan

keuangan atau *stakeholder* untuk memperoleh informasi terkait laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah. *Accesible* atau ketersediaan informasi yaitu pengguna laporan keuangan dapat mengakses informasi terkait laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet atau website. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan daerah diantaranya ketersediaan informasi laporan keuangan, kualitas informasi laporan keuangan dan media untuk mempublikasikan laporan keuangan (Bobby & Satria, 2018).

Dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan seseorang untuk mengakses informasi laporan keuangan pemerintah. Aksesibilitas bisa dikatakan baik apabila pemerintah mampu untuk memfasilitasi dan memberi kemudahan bagi para pengguna laporan keuangan untuk memperoleh informasi terkait laporan keuangan pemerintah daerah (Arumanti, 2018). Laporan keuangan selain disusun agar dapat dimengerti oleh penggunanya, laporan keuangan juga harus tersedia bagi pengguna laporan keuangan yang mau berusaha untuk memahaminya dan menggunakannya.

D. Latar Belakang Pendidikan

Menurut Rusmanto, et. al (2019) latar belakang pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan bentuk pekerjaan yang akan dilakukan dapat berpengaruh. Pendidikan akan mendorong kemampuan seseorang untuk menimbang dan memilih informasi

yang relevan yang nantinya akan digunakan terutama dalam pengambilan keputusan. Seseorang yang berpendidikan akan lebih baik dalam berfikir dan bertindak, serta lebih memahami tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Fontanella (2010) menyatakan bahwa latar belakang sebagai bagian kapasitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kunci dari penyediaan dan pemanfaatan laporan keuangan pemerintah. Latar pendidikan dapat menjadi acuan untuk memberikan beban kerja dan tanggungjawab seseorang untuk melaksanakan pekerjaannya. Latar belakang pendidikan seseorang harus menjadi pertimbangan dalam melakukan penempatan dimana seseorang seharusnya seseorang melaksanakan pekerjaannya serta melaksanakan tanggungjawabnya (Friyani et.al, 2020). Dalam penelitian ini latar belakang pendidikan ekonomi sangat diperlukan dalam memanfaatkan laporan keuangan. Pengguna yang berlatar belakang pendidikan ekonomi akan berbeda dengan pengguna yang tidak berlatar belakang pendidikan ekonomi dalam hal pemanfaatan laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi akan memiliki pengetahuan dan kompetensi yang mungkin akan lebih baik dalam penggunaan laporan keuangan apabila dibandingkan dengan yang berlatar belakang pendidikan non akuntansi (Sudarno, 2014). Dengan berlatar belakang pendidikan ekonomi seseorang akan mudah memahami akuntansi pemerintahan maupun Standar Akuntantansi Pemerintahan karena telah ilmu tentang dasar-dasar akuntansi (Friyani, 2020).

Latar belakang pendidikan merupakan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh seorang karyawan atau staff di suatu unit organisasi, seperti pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) umum atau SMA jurusan akuntansi, DIII (Ekonomi, Akuntansi atau lain-lainnya), S1 (Akuntansi, Ilmu Ekonomi, Manajemen) dan S2 (Ekonomi, Akuntansi atau lain-lainnya) (Fetriwahyuni, 2015).

E. Pengetahuan Akuntansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian. Sedangkan akuntansi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan proses pemahaman atau indentifikasi, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran kejadian dan transaksi keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Pengetahuan akuntansi adalah seperangkat ilmu tentang sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu entitas. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pengetahuan akuntansi merupakan orang yang pandai dan mengerti tentang akuntansi.

Pengetahuan akuntansi merupakan suatu ilmu yang harus dimiliki oleh pengguna internal laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan. Pentingnya pengetahuan akuntansi bagi pengguna internal laporan keuangan yaitu sebagai modal dasar dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa adanya hambatan. Selain itu pengetahuan akuntansi sangat diperlukan oleh pemerintah atau

kesatuan lainnya untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan keuangan dan dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengambil keputusan (Fetriwahyuni, 2015).

Pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal dalam menggunakan dan memanfaatkan laporan keuangan pemerintah sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan harus memiliki pemahaman akuntansi dan pemahaman terhadap laporan keuangan itu sendiri. Pemahaman akuntansi pengguna dan pemahaman terhadap laporan keuangan pemerintah akan membantu pengguna dalam penggunaan dan pemanfaatan informasi yang ada pada laporan keuangan pemerintah (Priharjanto & Andriana, 2020). Pemahaman atau pengetahuan akuntansi selain bisa didapatkan melalui pendidikan formal, pengetahuan akuntansi juga bisa didapatkan melalui pendidikan tidak formal seperti pelatihan akuntansi dan kursus singkat (Friyani, 2020).

Para pengguna laporan keuangan harus bisa memahami dan mengerti tentang informasi yang ada pada laporan keuangan pemerintah agar lebih mudah untuk menerjemahkan apa isi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. Pengguna laporan keuangan yang paham maksud dari informasi yang disajikan akan lebih mudah untuk menggunakan laporan keuangan ataupun melakukan analisis terhadap kinerja pemerintah. Jika pengguna laporan keuangan tidak paham dengan informasi yang disajikan oleh pemerintah, maka pengguna tidak akan menggunakan dan

memanfaatkan informasi yang ada pada laporan keuangan dengan maksimal (Sanjaya dkk 2014 dalam Mulia 2016).

Pengetahuan akuntansi meliputi pemahaman seseorang terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai acuan dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Pengetahuan ini meliputi pemahaman dari jenis-jenis laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah dan elemen-elemen penting yang ada dalam laporan keuangan pemerintah.

F. Pemanfaatan Laporan Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa:

1. Laporan keuangan bermanfaat untuk perencanaan dan penganggaran

Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat dimanfaatkan oleh penggunanya sebagai sumber informasi dalam hal perencanaan dan penganggaran (Franscissa, 2014). Perencanaan merupakan proses yang dimulai dari tahap penetapan tujuan organisasi yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh dan merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua pekerjaan organisasi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi (Bastian, 2010). Aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan kesejahteraan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Penganggaran merupakan penjabaran rencana atas pendapatan

dan pengeluaran organisasi sehingga pembelanjaan yang dilakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Bastian, 2010). Informasi yang ada dalam laporan keuangan dapat digunakan dalam perencanaan keuangan, penganggaran dan menghitung biaya (Fontanella, 2010).

2. Laporan Keuangan pemerintah bermanfaat untuk keperluan pengendalian

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa meskipun pemerintah memiliki akses yang detail terhadap informasi yang ada dalam laporan keuangan, pemerintah tetap harus memperhatikan informasi yang ada dalam laporan keuangan untuk keperluan pengendalian. Pengendalian akuntansi meliputi rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi dan semua metode beserta prosedur yang berkaitan dengan data akuntansi dan berhubungan langsung dengan pengamanan terhadap kekayaan entitas dan keandalan dari catatan keuangan (Bastian, 2001). Fungsi utama dari informasi akuntansi yaitu untuk pengendalian, karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif (Mardiasmo, 2004). Pengendalian organisasi bisa berupa aturan atau prosedur birokrasi atau melalui sistem pengendalian manajemen dan manajemen informasi yang dirancang secara formal. Penggunaan informasi akuntansi sebagai pengendalian terbagi atas dua yaitu sebagai alat pengendalian keuangan dan sebagai alat pengendalian organisasi (Mardiamo, 2004).

3. Laporan keuangan bermanfaat dalam memberikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan

Pemerintah sebagai penyusun laporan keuangan berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkeperntingan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik (Mardiamo,2004). Menurut Harrison (1999) dalam Wibowo (2017) pengambilan keputusan merupakan sebuah momen atau keadaan dalam proses yang berkesinabungan atas pengevaluasian alternatif-alternatif yang ada dalam mencapai tujuan dimana harapan-harapan terkait program tindakan tertentu yang mampu mendorong si pengambil keputusan untuk menyeleksi program tindakan yang paling memungkinkan tercapainya tujuan. Laporan keuangan dapat mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Menurut Suwarjono (2016) suatu informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut berguna untuk mengambil keputusan atau informasi tersebut harus mempunyai nilai. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Hal ini sejalan dengan GASB (1998) yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah memberikan informasi keuangan yang berguna untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Bagi pihak eksternal informasi yang ada pada laporan keuangan pemerintah daerah akan digunakan sebagai dasar

pertimbangan dalam pengambilan keputusan politik, sosial dan ekonomi (Ramadhani, et.al, 2014). Informasi yang disajikan pada laporan keuangan dibutuhkan oleh stakeholders sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2004).

4. Laporan keuangan pemerintah bermanfaat dalam menilai akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari pimpinan atau pengelola organisasi sektor publik terhadap pihak yang memiliki kepentingan serta masyarakat yang sudah memberikan amanah kepadanya (Bastian, 2010). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure terkait aktivitas dan kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kepada stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah (Mardiasmo,2004). Dalam Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Laporan keuangan pemerintah daerah harus berisikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan GASB (1998) yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah harus memungkinkan pengguna untuk menilai akuntabilitas pemerintah. Dengan disajikannya laporan keuangan oleh pemerintah maka pengguna dapat menilai bagaimana pemerintah menjadi akuntabel secara publik (Francissca, 2010).

5. Laporan keuangan pemerintah bermanfaat untuk penilaian kinerja pemerintah

Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program sehingga dapat mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi suatu organisasi (Bastian, 2005). Penilaian kinerja atau pengukuran kinerja merupakan proses mencatat atau mengukur pencapaian dari pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan (Larry D Stout, 1993 dalam Bastian, 2005). Penilaian kinerja dilakukan agar dapat mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2004). Penilaian kinerja sektor publik dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, pengalokasian sumberdaya dan pengambilan keputusan dan mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2004). Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh entitas pelaporan dan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam efektivitas dan efisiensi dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah dapat bermanfaat bagi penggunanya dalam mengevaluasi kinerja manajemen dan organisasi (Francissca, 2014). Bagi pengguna internal pemerintah daerah, informasi yang ada pada laporan keuangan pemerintah daerah akan digunakan untuk penilaian kinerja (Ramadhani, et.al, 2014). Hal ini juga diungkapkan dalam Fontanella (2010) pemerintah memerlukan informasi yang ada dalam laporan keuangan untuk menentukan indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja.

Brusca (1997) dalam Kurniawati 2017 menyatakan bahwa terdapat sepuluh kategori pemanfaatan laporan keuangan oleh masing-masing pengguna laporan keuangan pemerintah, di antaranya: pengambilan keputusan terkait belanja modal, pengambilan keputusan terkait debt operation, pengambilan keputusan terkait perpajakan, penyusunan anggaran untuk periode selanjutnya, analisis kondisi keuangan, pengambilan keputusan, proses penerbitan surat hutang, pertanggungjawaban kepada auditor, pertanggungjawaban kepada partai politik, penentuan biaya dan kinerja pelayanan publik. Dari kategori-kategori diatas, laporan keuangan pemerintah banyak dimanfaatkan oleh legislatif dalam penyusunan anggaran dan sebagai pertanggungjawaban kepada auditor. Sehingga legislatif dan tim penyusun anggaran dapat menyusun rencana anggaran dengan memprediksi besarnya pendapatan dan pengeluaran untuk periode selanjutnya.

Informasi yang disajikan pada laporan keuangan berbasis akrual memberikan beberapa manfaat bagi stakeholder (pihak pemangku kepentingan) dalam rangka: Menilai akuntabilitas pengelolaan sumberdaya oleh entitas, menilai kinerja, arus kas dan posisi keuangan suatu entitas, membantu pengambilan keputusan terkait penyediaan sumber daya atau melakukan bisnis dengan suatu entitas (IPSASB 2011 dalam Kemendagri 2014). Lebih lanjut dalam IPSASB study nomor 14 menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah berbasis akrual juga bermanfaat untuk menunjukkan bagaimana pemerintah dalam membiayai aktivitasnya, mengevaluasi kinerja pemerintah dalam membiayai seluruh aktivitasnya dan

memenuhi seluruh kewajibannya, menunjukkan perubahan posisi keuangan, menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya (Kemendagri, 2014).

G. Penelitian Terdahulu

Fontanella (2010) telah melakukan penelitian terkait pengaruh latar belakang pendidikan dan pengetahuan akuntansi pengguna terhadap pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah, sedangkan pengetahuan akuntansi pengguna berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Fontanella sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Francissca (2014) dan Fetriwahyuni (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi pengguna berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi hasil penelitian Fontanella yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah bertentangan dengan hasil penelitian Fetriwahyuni (2015). Hasil penelitian Fetriwahyuni menunjukkan bahwa latarbelakang pendidikan pengguna berpegaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Nirmala (2014) juga menyatakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kegunaan laporan keuangan. Sudarno dan Rakhmayani (2014) melakukan penelitian terkait pemanfaatan informasi yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran dilingkungan pemerintah daerah. Hasil penelitian Sudarno dan

Rakhmayani (2014) menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan Laporan Realisasi Anggaran.

Affandi (2017) melakukan penelitian terkait penggunaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh eksekutif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pihak eksekutif memanfaatkan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa eksekutif belum dapat memanfaatkan laporan keuangan pemerintah dengan optimal. Pihak eksekutif tidak dapat memanfaatkan laporan keuangan pemerintah dengan optimal dikarenakan beberapa kendala diantaranya sedikitnya aparatur daerah yang berlatar belakang akuntansi, terbatasnya pemahaman pemerintah selaku eksekutif, persepsi yang muncul bahwa laporan keuangan pemerintah hanya formalitas dalam melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah yang belum menggambarkan kinerja riil pemerintah daerah.

Kurniawati (2017) melakukan penelitian terkait penggunaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh pihak legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa DPRD belum memanfaatkan laporan keuangan pemerintah daerah dengan maksimal. Pemanfaatan laporan keuangan pemerintah oleh DPRD belum maksimal dikarenakan beberapa kendala. Beberapa kendala diantaranya kurangnya pemahaman DPRD terhadap laporan keuangan pemerintah daerah,

latar belakang pendidikan DPRD yang sangat jarang dari akuntansi, rendahnya kesadaran DPRD tentang pentingnya pemahaman terkait laporan keuangan pemerintah daerah dan ketidak sesuaian informasi yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Rusmanto et. Al (2019) telah melakukan penelitian terkait pemanfaatan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian Rusmanto et. Al (2019) menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh penggunanya. Priharjanto & Andriana (2020) telah melakukan penelitian terkait pengaruh kualitas laporan keuangan, aksesibilitas dan kapasitas sumberdaya terhadap pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas Laporan Keuangan dan kapasitas sumberdaya berpengaruh terhadap pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah secara parsial, akan tetapi secara simultan aksesibilitas dan kualitas laporan keuangan pemerintah mempengaruhi pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bandary (2011), Ramadhani (2014) dan Mulia (2016) yang menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap penggunaan laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian Bandariy (2011), Ramadhani (2014) dan Mulia (2016) menunjukkan bahwa dengan adanya kemudahan para pengguna laporan keuangan untuk mengakses informasi laporan

keuangan pemerintah daerah maka pengguna akan tertarik menggunakan informasi yang tersedia dan menggunakannya dengan optimal.

H. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Kualitas Laporan Keuangan dengan Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Karakteristik kualitatif yang disyaratkan yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Dalam pemanfaatan laporan keuangan pemerintah pengguna akan memperhatikan kualitas dari informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang disajikan. Jika laporan keuangan tidak memiliki kualitas yang baik maka pengguna akan ragu untuk menggunakan laporan keuangan tersebut karena dapat menyesatkan terutama dalam pengambilan keputusan (Prijahanto & Andriana, 2020). Oleh karena itu pengguna akan menggunakan laporan keuangan jika laporan keuangan tersebut memiliki kualitas yang bagus.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Steccoloni (2002) di Italia menyebutkan bahwa para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkan informasi yang disajikan karena kualitas laporan keuangan yang buruk sehingga peran dari laporan keuangan dan tingkat akuntabilitas pemerintah daerah di Italia dipertanyakan. Affandi (2017) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa pihak internal belum

dapat memanfaatkan laporan keuangan pemerintah salahsatunya dikarenakan kualitas laporan keuangan yang kurang baik.

Hubungan antara kualitas laporan keuangan pemerintah dengan pemanfaatan laporan keuangan dapat dijelaskan dengan teori agensi. Dimana pemerintah sebagai agen berkewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan sebagai prinsipal. Jika laporan keuangan yang disajikan pemerintah tidak berkualitas maka akan timbul keraguan pengguna laporan keuangan untuk menggunakan dan memanfaatkannya. Hal ini dapat mengakibatkan tidak optimalnya pemanfaatan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan.

Bandariy (2011) telah melakukan penelitian terkait pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap penggunaan informasi laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap penggunaan laporan keuangan pemerintah oleh pengguna laporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani et.al (2014) dan Mulia (2016) yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap penggunaan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan semakin bagus penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah maka laporan tersebut akan semakin digunakan oleh penngguna laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Priharjanto & Andriana (2020) terkait pemanfaatan laporan keuangan pemerintah oleh pengguna

laporan keuangan menunjukkan hasil bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan laporan keuangan oleh penggunanya. Jika laporan keuangan yang disajikan tidak berkualitas maka akan timbul keraguan bagi pengguna untuk memanfaatkan laporan keuangan tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2. Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan dengan Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mulia (2016) aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah agar dapat mempermudah pengguna laporan keuangan pemerintah untuk mendapatkan informasi keuangan. Pengguna laporan keuangan akan menggunakan dan memanfaatkan laporan keuangan yang telah disajikan oleh pemerintah jika adanya kemudahan untuk memperoleh informasi didalamnya. Dengan adanya kemudahan pengguna laporan keuangan untuk memperoleh informasi terkait laporan keuangan maka laporan keuangan tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan dengan optimal.

Hubungan antara aksesibilitas dengan pemanfaatan laporan keuangan dapat dijelaskan dengan teori agensi. Pemerintah sebagai agen berkewajiban memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan sebagai prinsipal

untuk memperoleh informasi terkait laporan keuangan. Jika pengguna laporan keuangan tidak diberikan kemudahan untuk memperoleh dan mengakses informasi keuangan pada saat dibutuhkan, maka pengguna laporan keuangan tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan laporan keuangan pemerintah dengan optimal.

Bandariy (2011) telah melakukan penelitian terkait pengaruh aksesibilitas terhadap penggunaan laporan keuangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap penggunaan laporan keuangan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Hasil penelitian Bandariy (2011) sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani et.al (2014) dan Mulia (2016) yang menunjukkan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap penggunaan laporan keuangan pemerintah oleh penggunanya. Dari hasil beberapa sebelumnya penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses informasi laporan keuangan maka para pengguna akan menggunakan laporan keuangan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Prijahanto & Andriana (2020) menunjukkan hasil bahwa aksesibilitas secara simultan mempengaruhi pemanfaatan laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang mengaitkan aksesibilitas terhadap penggunaan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan, penulis mencoba merumuskan bahwa aksesibilitas mempunyai pengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan. Dengan kemudahan akses

dalam memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah maka pengguna akan dapat memanfaatkan laporan keuangan dengan optimal. Hal ini serupa dengan rumusan hipotesis yang sudah dilakukan Priharjanto dan Andriana (2020) yang menghubungkan aksesibilitas dengan pemanfaatan laporan keuangan. Oleh karena itu penulis membuat hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah.

3. Hubungan Latar Belakang Pendidikan dengan Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan dapat berkaitan. Hal ini terkait dengan kualifikasi individu dengan pekerjaannya. Kualifikasi individu yang berkaitan dengan pemanfaatan laporan keuangan pemerintah yaitu ekonomi. Individu yang dimaksud disini adalah pengguna Laporan Keuangan Pemerintah. Pengguna laporan keuangan pemerintah yang berlatar belakang ekonomi akan memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait akuntansi dan laporan keuangan dibandingkan pengguna yang tidak berlatar belakang pendidikan tidak dari ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Affandi (2017) pihak eksekutif belum memanfaatkan laporan keuangan pemerintah daerah yang tersedia karena salah satunya penyebabnya latar belakang pendidikan pihak eksekutif yang berasal dari akuntansi. Selain itu penelitian yang

dilakukan oleh Kurniawati (2017) menyebutkan bahwa legislatif belum memanfaatkan laporan keuangan pemerintah daerah dengan maksimal. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena latar belakang pendidikan pihak legislatif yang beragam dan jarang berasal dari akuntansi. Oleh karena itu latar belakang pendidikan yang sesuai sangat penting bagi pengguna laporan keuangan agar dapat memahami laporan keuangan tersebut dan dapat memanfaatkannya dengan optimal.

Sudarno dan Rakhmayani (2014) dalam penelitiannya yang menguji pengaruh latar belakang pendidikan terhadap pemanfaatan laporan realisasi anggaran di lingkungan pemerintah, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan Laporan Realisasi Anggaran oleh penggunanya. Selain itu Fetriwahyuni (2015) dalam penelitiannya juga menguji pengaruh latar belakang pendidikan terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah oleh penggunanya. Pengguna laporan keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi akan memiliki pengetahuan dan kompetensi yang mungkin akan lebih baik dalam penggunaan laporan keuangan apabila dibandingkan dengan yang berlatar belakang pendidikan non akuntansi (Sudarno, 2014).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis membuat hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Latar belakang pendidikan pengguna berpengaruh positif terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah

4. Hubungan Pengetahuan Akuntansi terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam pemanfaatan informasi yang ada dalam laporan keuangan pemerintah maka diperlukannya pemahaman pengguna akan laporan keuangan dan akuntansi sehingga mampu menggunakan dan memanfaatkan laporan keuangan pemerintah dengan optimal (Priharjanto & Andriana, 2020). Pentingnya pengetahuan akuntansi dimiliki pengguna laporan keuangan karena dapat menjadi faktor pendorong dalam pemanfaatan laporan keuangan. Hasil dari penelitian Fontanella (2010) menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi yang dimiliki pengguna akan mempengaruhinya dalam pemanfaatan laporan keuangan. Semakin baik tingkat pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pengguna, maka akan semakin tinggi juga pemanfaatan laporan keuangan pemerintah. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pengguna maka akan membantu mereka untuk memahami informasi-informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah sehingga dapat memanfaatkannya. Pengguna laporan keuangan yang memiliki tingkat pengetahuan akuntansi yang kurang akan cenderung tidak memanfaatkan informasi yang ada pada laporan keuangan pemerintah.

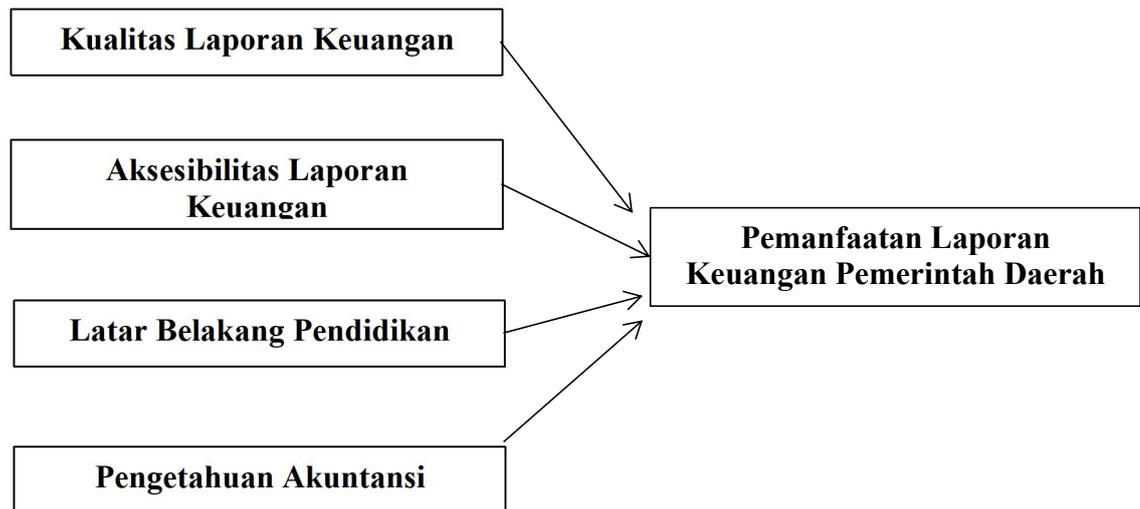
Francissca (2014) dan Fetriwahyuni (2015) telah melakukan penelitian terkait pengaruh pengetahuan akuntansi pengguna terhadap pemanfaatan laporan keuangan. Hasil dari penelitian Francissca (2014) dan Fetriwahyuni (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi pengguna (user) berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna yang memiliki pengetahuan akuntansi maka dia akan paham tentang isi dari laporan keuangan tersebut, sehingga pengguna tersebut dapat menggunakan dan memanfaatkan laporan keuangan pemerintah yang telah disajikan dengan maksimal. Jika pengguna tidak memiliki pengetahuan akuntansi maka pengguna tidak akan paham terkait laporan keuangan tersebut dan tidak akan memanfaatkannya dan akan mengabaikannya. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Pengetahuan Akuntansi yang dimiliki pengguna berpengaruh positif terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah.

I. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori dan hubungan antar variabel yang sudah dijelaskan oleh penulis diatas, maka kerangka konseptual untuk menggambarkan hubungan antara kualitas laporan keuangan, aksesibilitas, latar belakang pendidikan dan pengetahuan akuntansi dengan pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh kualitas laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, latar belakang pendidikan dan pengetahuan akuntansi terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0.028 < 0.05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $2.215 > t_{tabel} 1.6546$.
2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0.041 < 0.05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $2.059 > t_{tabel} 1.6546$.
3. Latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0.741 > 0.05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $-0.332 < t_{tabel} 1.6546$.
4. Pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.005$ dan nilai t_{hitung} sebesar $7.481 > t_{tabel} 1.6546$.

B. Keterbatasan

1. Data yang diperoleh dari responden secara tertulis dalam bentuk pengisian kuesioner dalam penelitian ini mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian, karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda apabila data diperoleh dari wawancara secara langsung kepada responden.
2. Pengguna internal dan eksternal yang diteliti dalam penelitian ini terbatas, yaitu hanya kepala SKPD sebagai pengguna internal dan anggota DPRD sebagai pengguna eksternal.

C. Saran

1. Guna meningkatkan pemanfaatan laporan keuangan oleh penggunanya, pemerintah harus dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dan memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses informasi terkait laporan keuangan pemerintah.
2. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat diketahui bahwa pengetahuan akuntansi dapat mendukung pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu pengguna laporan keuangan perlu untuk terus meningkatkan pengetahuan akuntansi agar pemanfaatan laporan keuangan dapat lebih baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti judul yang sama, perlu untuk mempertimbangkan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang

digunakan dapat menjelaskan sebesar 49.2% sedangkan 50.8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

D. Implikasi

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas laporan keuangan agar optimalnya pemanfaatan laporan keuangan oleh penggunanya.
2. Bagi akademis penelitian ini dapat membantu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna dalam pemanfaatan laporan keuangan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandy, A. T. (2017). Penggunaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Perspektif Eksekutif (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Malang Raya). Akuntansi. Universitas Brawijaya.
- Anggraini, L., Taufik, T., & Ramadhani, Y. (2014). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi pada Provinsi Riau) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Bandariy, H., & ROHMAN, A. (2011). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Bastian, Indra. (2001). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Yogyakarta: Erlangga.
- Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. 2014. Modul Penerapan Akuntansi Berbasis akrual. <http://keuda.kemendagri.go.id/pages/view/20-modul-penerapan-akuntansi-berbasis-akrual>. Diakses pada 15 maret 2021.
- Fontanella, Amy. (2010). Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 5 No.2 Desember 2010.
- Francisca, C. W. (2014). Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kota Padang). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang: Padang.

- Friyani, R. (2020). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD di Pemerintah Kabupaten Muara Bungo). *Jambi Accounting Review*, 1(1), 1-19.
- Ghozali, Imam. (2016). Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis dan Ilmu Sosial Lainnya. Semarang: Yoga Pratama.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Governmental Accounting Standard Board . (1998). Governmental Accounting and Financial Reporting Standard. GASB. Norwalk, Conn.
- Gujarati, D. N. (2006). Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, M. A., Desmiyawati, D., & Fetriwahyuni, R. (2015) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengguna dalam Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *Jom FEKON Vol 2 No.2* Oktober 2015.
- Haza, I. I. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah kota padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Ichalina, F., & Handayani, N. (2019). PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(5).
- Kurniawati, E. T. U. (2017). Penggunaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Fungsi Pengawasan berdasarkan Perspektif Legislatif (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Malang Raya). Doctoral dissertation. Universitas Brawijaya.
- Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

- Mulia, W. A. (2016). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Nahartyo, E., & Utami, I. (2019). *PANDUAN PRAKTIS RISET EKSPERIMEN*. Jakarta Barat: Penerbit Indeks Jakarta: (73-75)
- Nirmala, T. P., Alfian, M., & Sari, Y. P. (2014). *Kegunaan Pelaporan Keuangan Untuk Pembuatan Keputusan Internal*. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1), 36-46.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Priharjanto, A., & Andriana, N. (2020). *Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Aksesibilitas terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan*. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 13(1), 39-53.
- Rakhmayani, A., & Sudarno, S. (2014). *Studi Pemanfaatan Informasi Laporan Realisasi Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Rusmanto, R., Saputra, I., & Makhriati, M. (2019). *PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, PENGALAMAN DAN FAKTOR SOSIAL TERHADAP PEMANFAATAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) PADA SKPD KOTA BANJARMASIN*. *Dinamika Ekonomi-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 294-313.
- Sande, Peggy. (2013). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap AKuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang: Padang.

- Satria, D. I., & Bobby, M. A. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 73-86.
- Steccolini, Ileana. 2002. Local Government Annual Report: An Accountability Medium?. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms, Dublin, September 2002.
- Sugiyono. (2012). Statistika Untuk Penelitian. Cetakan ke 21. Bandung: Alfabeta
- Suwardjno. (2016). Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF.
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Wibowo, K. P. (2017). Kegunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan internal oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 2(4), 73-91.